

**EVALUASI KEBIJAKAN EKSPOR DAN IMPOR DI
KOTA BATAM**

SKRIPSI



**Oleh :
Yeni Okyanti
151010040**

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS PUTERA BATAM
2019**

EVALUASI KEBIJAKAN EKSPOR DAN IMPOR DI KOTA BATAM

SKRIPSI

**Untuk memenuhi salah satu syarat
Guna memperoleh gelar sarjana**



**Oleh :
Yeni Okyanti
151010040**

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS PUTERA BATAM
TAHUN 2019**

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana, dan/atau magister), baik di Universitas Putera Batam maupun di perguruan tinggi lain.
2. Skripsi ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan pembimbing.
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh,serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi.

Batam, 29 Juli 2019

Yang membuat pernyataan,

Materai Rp 6.000,00

Yeni Okyanti

151010040

EVALUASI KEBIJAKAN EKSPOR DAN IMPOR DI KOTA BATAM

SKRIPSI

**Untuk memenuhi salah satu syarat
Guna memperoleh gelar sarjana**

**Oleh:
Yeni Okyanti
151010040**

**Telah disetujui pembimbing pada tanggal
Seperti tertera di bawah ini**

Batam, 06 September 2019

**Azhar Abbas, S.Sos., M.Si.
Pembimbing**

ABSTRAK

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batam melaksanakan evaluasi kebijakan ekspor dan impor dalam bidang perdagangan. Perdagangan dalam bidang ekspor dan impor belakangan ini semakin merosot yang berdampak ke dalam perkembangan perekonomian Indonesia, oleh sebab itu maka perlu dilakukan evaluasi kebijakan agar peraturan yang di implementasikan berjalan sesuai dengan yang telah direncanakan. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 Pasal 1 tentang Perdagangan, sebagai mana yang tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 13/M-DAG/PER/3/2012 Tentang Ketentuan Umum di Bidang Ekspor, Sedangkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 48/M-DAG/PER/7/2015 Tentang Ketentuan Umum di Bidang Impor. Tujuan dari penelitian ini untuk mengevaluasi kebijakan ekspor dan impor di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batam. Metode penelitian adalah kualitatif. Teknik pengumpulan data wawancara, observasi dan dokumentasi. Objek penelitian adalah Pegawai Dinas Perindustrian dan Perdagangan, pelaku usaha dan masyarakat. Hasil penelitian adalah mengevaluasi kebijakan ekspor dan impor yang dikeluarkan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batam yang secara menyeluruh belum mencapai standar karena masih ada kesenjangan antara pihak dinas dan masyarakat. Berdasarkan indikator evaluasi kebijakan yaitu keefektifan, efisiensi, kecukupan, kesamaan, ketanggapan dan ketepatangunaan, evaluasi kebijakan masih belum cukup efektif dan efisien, sehingga ekspor dan impor masih mengalami penurunan dan belum dapat dan belum mampu berdaya saing terhadap barang-barang internasional.

Kata Kunci: Evaluasi, Pelaksanaan Kebijakan, Ekspor dan Impor

ABSTRACT

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Batam City conducts an evaluation of export and import policies in the field of trade. Trade in the field of exports and imports has been declining lately which has an impact on the development of the Indonesian economy, therefore it is necessary to conduct an evaluation of policies so that the implemented regulations run as planned. According to the Law of the Republic of Indonesia Number 7 of 2014 Article 1 concerning Trade, as stipulated in the Regulation of the Minister of Trade of the Republic of Indonesia Number: 13 / M-DAG / PER / 3/2012 concerning General Provisions in the Export Sector, Whereas the Republic of the Minister of Trade Regulation Indonesia Number 48 / M-DAG / PER / 7/2015 concerning General Provisions in the Import Sector. The purpose of this study is to evaluate export and import policies at the Batam City Industry and Trade Office. The research method is qualitative. Interview, observation and documentation data collection techniques. The object of research is the Industry and Trade Service Employees, business people and the community. The results of the study are evaluating the export and import policies issued by the Batam City Industry and Trade Office which as a whole have not yet reached the standard because there are still gaps between the department and the community. Based on policy evaluation indicators namely effectiveness, efficiency, adequacy, equality, responsiveness and efficiency, policy evaluation is still not effective and efficient enough, so exports and imports are still experiencing a decline and have not been able or unable to compete with international goods.

Keywords: Evaluation, Policy Implementation, Export and Import

KATA PENGANTAR

Dengan menyebut nama Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang yang telah melimpahkan segala Rahmat dan Karunia sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan tugas akhir yang merupakan salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program studi strata satu (S1) pada Program Studi Administrasi Negara Universitas Putera Batam.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Karena itu, kritik dan saran akan senantiasa penulis terima dengan senang hati. Dengan segala keterbatasan, penulis menyadari pula bahwa skripsi ini takkan terwujud tanpa bantuan, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak. Untuk itu, dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Ibu Dr. Nur Elfi Husda, S.Kom., M.SI. selaku Rektor Universitas Putera Batam.
2. Ibu Rizki Tri Anugrah Bhakti, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas Putera Batam.
3. Bapak Bobby Mandala Putera, S.IP., M.Si. selaku Ketua Program Studi Administrasi Negara.
4. Bapak Azhar Abbas, S.Sos., M.Si. selaku pembimbing yang sabar dan bersedia meluangkan waktu untuk memberikan arahan, motivasi serta dukungan kepada penulis hingga selesainya skripsi ini dengan baik.
5. Ibu Ulina Harma, S.AP., M.A.P. selaku dosen pembimbing akademik yang selalu bersedia memberi masukan dan mendengarkan keluh kesah penulis.

6. Bapak/Ibu penguji yang telah bersedia menjadi penguji dan memberikan saran dan kritik yang bermanfaat bagi penulis.
7. Bapak/Ibu Dosen Program Studi Administrasi Negara dan Bapak/Ibu seluruh Dosen Pengajar Universitas Putera Batam yang telah membuka wawasan penulis dengan berbagai ilmu pengetahuan, pengalaman dan motivasinya.
8. Kepada Ibu Leny Nuriskawaty selaku Kepala Seksi Ekspor dan Impor di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batam, serta seluruh Staf Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batam yang turut membantu penulis dalam penelitian ini.
9. Kedua orang tua yang penulis banggakan ayahanda Aspuri dan ibunda Tri Kartika yang menjadi motivasi penulis selama menyelesaikan studi serta kedua saudara/i Sari Martini Putri dan Akhmad Taufik Zakiri Alamsyah Putra yang sangat penulis cintai yang selalu memberikan motivasi, dukungan, serta selalu mendoakan agar tidak mudah putus asa dan terus semangat dalam meraih cita-cita dan tidak lupa juga untuk keluarga besar yang selalu mendukung dan memberikan doa bagi penulis.
10. Kepada Ali Imron sebagai pacar, sahabat, sekaligus abang yang selalu memberikan nasehat, motivasi, perhatian dan menjadi pendengar setia di kala keluh kesah melanda penulis.
11. Teman-teman di Universitas Putera Batam Program Studi Administrasi Negara angkatan 2015, khususnya teruntuk BUNEG SQUAD gadis manis dan imut Rapina Malemta Sembiring, Aprillia, Khoirunisya, Hafizhotun

Ni'mah, Arisna, Nurdiana, Yessika Simanullang, Pricilia Anggini, Eric Elmahyudi Putra, Khoirul Umam dan Nofriyandi yang selalu menghibur, memberikan semangat yang luar biasa dan membantu ketika penulis mengalami kesulitan selama penyusunan skripsi.

12. Kepada sahabat-sahabat GHIBAH SQUAD Gracia Asri, Novia Suhendri, Fernanda Granita, Leonardo, Soedrajad Haryo Adji dan Bimas Dewantoro yang penulis sangat sayangi yang selalu menghibur dengan memberikan topik ghibahan dikala penulis merasa jenuh dan putus asa.
13. Serta seluruh pihak yang memberikan masukan, kritik dan saran serta bantuan yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Penulis hanya bisa berdoa semoga Tuhan melindungi setiap perjalanan yang kita tempuh kedepannya dan bisa bertemu kembali di lain waktu dengan keadaan sehat dan sukses. Amin.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa masih banyak kekurangan pada penyusunan skripsi ini, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi kelancaran penyusunan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua, terkhusus bagi pembaca semoga skripsi ini dapat menambah wawasan dan menjadi referensi untuk penyusunan skripsi berikutnya. Akhir kata penulis ucapkan terima kasih.

Batam, 29 Juli 2019

Yeni Okyanti

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR TABEL	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Manfaat Penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1 Teori Dasar	9
2.1.1 Kebijakan Publik	9
2.1.2 Implementasi Kebijakan.....	13
2.1.3 Evaluasi Kebijakan.....	18
2.1.4 Ekspor dan Impor	21
2.2 Penelitian Terdahulu.....	27
2.3 Kerangka Pemikiran	32
BAB III METODE PENELITIAN	33
3.1 Jenis Penelitian	33
3.2 Fokus Penelitian	33
3.3 Sumber Data	34
3.4 Teknik Pengumpulan Data	34
3.5 Metode Analisis Data	36

3.6 Keabsahan Data	37
3.7 Lokasi dan Jadwal Penelitian	38
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	40
4.1 Hasil Penelitian.....	40
4.1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian	40
4.1.2 Pelaksanaan Kebijakan Ekspor dan Impor di Kota Batam.....	44
4.1.3 Evaluasi Kebijakan Ekspor dan Impor di Kota Batam.....	52
4.2 Pembahasan	60
4.2.1 Pelaksanaan Kebijakan Ekspor dan Impor di Kota Batam.....	61
4.2.2 Evaluasi Kebijakan Ekspor dan Impor di Kota Batam	66
BAB V SIMPULAN DAN SARAN	73
5.1 Simpulan.....	73
5.2 Saran.....	74
DAFTAR PUSTAKA	75
LAMPIRAN	

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
2.1 Skema Implementasi Kebijakan	15
2.2 Kerangka Pemikiran	32
3.1 Komponen dalam Analisis Data (<i>Interactive Model</i>).....	37
4.1 Struktur Organisasi	42
4.2 Data Pegawai Berdasarkan Golongan	43
4.3 Persentase Komposisi Pegawai Dinas Tenaga Kerja Kota Batam	43

DAFTAR TABEL

	Halaman
1.1 Data Nilai Ekspor dan Impor Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) Batam Tahun 2016-2018	6
3.1 Daftar Narasumber	35
3.2 Jadwal Pelaksanaan Penelitian	39

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kota Batam merupakan kota terbesar di Provinsi Kepulauan Riau dan termasuk sebagai kawasan perdagangan bebas. Pemerintah mengembangkan Kota Batam sebagai kawasan industri dengan meningkatkan sarana dan prasarana untuk mendukung kegiatan industri guna memperluas wilayah kegiatan perekonomian di Kota Batam. Beberapa tahun belakangan ini telah digulirkan penerapan FTZ Batam (*Free Trade Zone Batam*) yang meliputi Batam, Bintan dan Karimun. Dewasa ini, demi meningkatkan pertumbuhan perekonomian aspek yang paling penting yaitu terjalinnya hubungan antar negara dalam bidang perdagangan dengan berbagai macam inovasi yang dikembangkan dalam mempertahankan eksistensi kerjasama perdagangan yang lebih baik.

Perdagangan yang dimaksud disini adalah perdagangan dalam bidang ekspor dan impor yang belakangan ini semakin merosot yang berdampak masif ke dalam perkembangan perekonomian indonesia oleh sebab itu maka perlu dilakukan evaluasi kebijakan agar peraturan yang akan di implementasikan berjalan sesuai dengan yang telah di tentukan. Menurut pakar Moekijat dalam (Suaib, 2016 : 107) yaitu evaluasi adalah usaha-usaha untuk menyelidiki apakah program yang dilaksanakan sesuai dengan apa yang diinginkan atau tidak, dan menurut Bryant dan White dalam (Suaib, 2016 : 107) mendefinisikan evaluasi

sebagai upaya untuk mendokumentasikan apa yang terjadi dan juga mengapa hal itu terjadi.

Sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 13/M-DAG/PER/3/2012 Tentang Ketentuan Umum di Bidang Ekspor Pasal 1 ayat (1) menjelaskan bahwa Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang dari Daerah Pabean, pasal 1 ayat (2) juga menjelaskan mengenai definisi Daerah Pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat perairan dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku Undang-Undang mengenai kepabeanan. Sedangkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 48/M-DAG/PER/7/2015 Tentang Ketentuan Umum di Bidang Impor Pasal 1 ayat (2) Impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam Daerah Pabean.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 Pasal 1 tentang Perdagangan sebagai menyatakan perdagangan adalah tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi barang dan/atau jasa didalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak dan barang dan/atau jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan sebagai acuan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batam dalam melaksanakan kebijakan yang diatur didalamnya, untuk upaya peningkatan ekspor dan impor di Kota Batam.

Terkait hal di atas maka perlu tindak lanjut yang nyata dari pihak terkait pemerintah, swasta dan masyarakat harus turut bekerjasama untuk melakukan

perubahan demi kemajuan perkembangan perekonomian indonesia yang tentunya berdampak luas terutama dalam bidang ekspor dan impor yang menyangkut kemajuan bangsa indonesia. Hubungan perekonomian antar negara ini menjadi saling terkait karena adanya perdagangan internasional yang mencakup aktivitas ekspor dan impor yang mempunyai dampak terhadap pertumbuhan ekonomi.

Dengan adanya kegiatan ekspor dan impor ini juga dapat menjadi tolak ukur majunya negara tersebut dengan melihat grafik hasil laporan ekspor dan impor di suatu daerah khususnya di Kota Batam mengingat Kota Batam merupakan kota yang memiliki tingkat kepadatan penduduk yang tinggi oleh sebab itu permintaan tingkat kebutuhan pangan sandang dan papan secara otomatis tinggi maka dalam hal ini kebijakan ekspor dan impor yang dilaksanakan harus berjalan sesuai dengan tingkat kebutuhan masyarakat agar kesejahteraan masyarakat terjamin, karena kebijakan ekspor impor sangat berpengaruh terhadap perekonomian Kota Batam seperti yang kita ketahui laju pertumbuhan perekonomian di Kota Batam sangat berpengaruh dengan masuknya investor asing akan tetapi hal ini akan sulit berjalan jika tingkat kerjasama ekspor impor yang menurun.

Ekspor dan impor merupakan suatu hal yang sangat penting dalam perkembangan perekonomian suatu negara, kegiatan ekspor dan impor sangat berpengaruh terhadap kebijakan pemerintah. Sedangkan perkembangan yang terjadi belakangan ini menunjukkan bahwa semakin merosotnya ekspor dan impor, seperti yang terlihat dalam artikel bahwa Perkembangan nilai ekspor dan impor dari Provinsi Kepulauan Riau pada Januari 2018 mengalami penurunan jika dibandingkan bulan Desember 2017 tahun lalu (Rasio, 2018).

Kegiatan ekspor dan impor dari hasil industri pengolahan di Batam turun drastis dalam setahun terakhir. Hal ini menguatkan bahwa Asosiasi Tenaga Kerja Kepabeanaan (ATAK) Batam mencatat penurunan terjadi hingga 50 persen. Sepinya impor barang baku ke Batam menandakan kegiatan industri pengolahan di Batam juga tengah lesu. Dan otomatis kegiatan ekspor barang hasil industri juga menurun. Imbasnya, banyak perusahaan manufaktur maupun galangan kapal di Batam sepi order.

Menurut Tachjan dalam (Mulyadi, 2016 : 165) menjelaskan tentang tujuan kebijakan publik bahwa tujuan kebijakan publik adalah dapat diperolehnya nilai-nilai oleh public baik yang bertalian dengan *public goods* (barang publik) maupun *public service* (jasa publik). Dari hal itu terlihat jelas bahwa kurangnya kebijakan yang di ambil dapat berpengaruh terhadap perkembangan ekspor impor, sedangkan kebijakan ekspor dan impor di Kota Batam belum mengalami perubahan yang pesat (Batampos, 2017).

Penurunan ekspor dan impor di Kepulauan Riau khususnya di Kota Batam pada awal tahun 2018 ini disebabkan karena adanya penurunan ekspor dan impor melalui kedua sektor yakni migas dan non migas. Penurunan ini tidak hanya terlihat di Kota Batam hal ini juga terjadi di ekspor dan impor di Kalimantan Timur. Terlihat dalam salah satu artikel di Tribun Kaltim yang menjelaskan bahwa ekspor di Kalimantan Timur hingga pertengahan tahun 2018 lebih besar dibandingkan impor. Berdasarkan data yang terdapat di Badan Pusat Statistik (BPS) Kalimantan Timur mencatat bahwa ekspor di Kalimantan Timur pada

periode Januari-Juli tahun 2018 sebesar 10,6 miliar dollar Amerika (USD) (TribunKaltim, 2018).

Pengimplementasian ekspor dan impor di Kota Batam belum sepenuhnya sesuai dengan kebijakan yang telah ditentukan perlu adanya evaluasi kembali untuk melihat sejauh mana kebijakan itu berjalan evaluasi dilakukan agar para pembuat kebijakan dapat melihat kesalahan-kesalahan saat pengimplementasian ekspor impor berjalan mana yang harus diperbaiki dan mana yang tetap di pertahankan sesuai dengan peraturan yang berlaku melihat perekonomian Kota Batam tidak stabil perlu adanya dorongan dari pihak luar seperti masuknya investor asing agar laju pertumbuhan ekonomi meningkat maka ekspor dan impor disini sangat berperan penting sebagai jalan masuknya penanaman modal dari investor asing.

Tabel 1.1 Data Nilai Ekspor dan Impor Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Batam Tahun 2016-2018

Komoditas	Nilai (Juta US\$)					
	Ekspor			Impor		
	2016	2017	2018	2016	2017	2018
Migas	816.25	1208.48	977.72	59.08	73.31	40.65
Non Migas	7595.92	7500.22	5263.82	6068.74	6388.52	5962.06
Total	8412.17	8708.70	6231.54	6127.84	6461.83	6002.71

(Sumber : Website Badan Pusat Statistik (BPS) Batam)

Seperti data yang telah diuraikan pada tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah nilai ekspor dan impor pada komoditas migas dan non migas di Kota Batam setiap tahunnya mengalami penurunan. Kebijakan terhadap ekspor dan

impor di Kota Batam saat ini diharapkan mampu meningkatkan kembali nilai ekspor dan impor.

Hasil penelitian dalam Suherry (2016) mengatakan evaluasi yang dilaksanakan akan berjalan jika hal ini dapat tercapai apabila pemerintah mempunyai cara agar pembangunan dapat dijalankan, salah satu cara adalah dengan menarik investor, baik dari dalam negeri maupun luar negeri untuk berinvestasi di daerah tersebut. Untuk mendatangkan investor dari luar negeri, Pemerintah mensiasatinya dengan menciptakan iklim investasi yang lebih menarik yaitu dengan menetapkan Kawasan Khusus yang berbentuk kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (*Free Trade Zone*) di Kepri.

Berdasarkan uraian yang telah di jelaskan sebelumnya maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Evaluasi Kebijakan Ekspor Dan Impor Di Kota Batam**”.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan kebijakan ekspor dan impor di Kota Batam?
2. Bagaimana evaluasi kebijakan ekspor dan impor di Kota Batam?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisa pelaksanaan kebijakan ekspor dan impor di Kota Batam.
2. Untuk menganalisa evaluasi kebijakan ekspor dan impor di Kota Batam.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Keilmuan Administrasi Publik

- a. Memberikan kontribusi pada pengelola ekspor dan impor guna mendukung pengembangan teori yang sudah ada, khususnya mengenai ekspor dan impor Kota Batam.
- b. Dapat digunakan sebagai bahan masukan dalam bidang evaluasi, khususnya pada evaluasi kebijakan ekspor dan impor Kota Batam.
- c. Menjadi referensi bagi mahasiswa sebagai pedoman untuk penelitian selanjutnya secara lebih komprehensif.

2. Bagi Dinas Perindustrian dan Perdagangan

- a. Penelitian ini diharapkan akan menambah wawasan mengenai evaluasi kebijakan ekspor dan impor.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif berupa saran serta evaluasi sebagai bahan pertimbangan atas pelaksanaan kebijakan- kebijakan terkait dengan usaha ekspor dan impor.
- c. Diharapkan hasil penelitian ini dapat meningkatkan informasi dan gambaran tentang evaluasi kebijakan ekspor dan impor serta diharapkan mampu menambah wawasan bagi yang membutuhkan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Teori Dasar

2.1.1 Kebijakan Publik

Kata kebijakan berasal dari kata bijak yang berarti pandai, yang sering kali kita jumpai karena menyangkut kehidupan sehari-hari, baik pada bidang perekonomian, politik, sosial, dari tingkat nasional hingga tingkat internasional. Kebijakan publik adalah apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan, karena kebijakan publik harus mencakup apa saja yang diinginkan pemerintah untuk melakukan sesuatu yang mempunyai dampak dan konsekuensi yang sama besarnya terhadap masyarakat (Islamy, 2014 : 1.3). Maka dari itu pengaruh kebijakan sangatlah besar terhadap kehidupan dalam masyarakat.

Menurut William J. dalam (Islamy, 2014 : 1.5) Kebijakan publik adalah serangkaian keputusan yang dibuat oleh seorang aktor atau sekelompok aktor politik mengenai pemilihan tujuan-tujuan dan cara untuk mencapai tujuan dalam suatu situasi tertentu dimana keputusan-keputusan tersebut seyogianya secara prinsip masih berada dalam kekuasaan aktor-aktor tersebut untuk mencapainya.

A. Unsur-unsur Kebijakan Publik

Sebagai sebuah sistem yang terdiri atas subsistem atau elemen, komposisi dari kebijakan dapat diikuti dari dua perspektif, yaitu proses kebijakan dan

struktur kebijakan. Melalui proses kebijakan, terdapat tahap-tahap identifikasi masalah dan tujuan, formulasi kebijakan, implementasi, dan evaluasi kebijakan. Dilihat dari segi struktur terdapat lima unsur kebijakan (Abidin, 2012 : 25) sebagai berikut:

1. Unsur tujuan kebijakan

Telah dipahami bahwa suatu kebijakan dibuat karena ada tujuan yang ingin dicapai. Tanpa ada tujuan, tidak perlu ada kebijakan. Perbedaannya tidak hanya sekedar pada jangka waktu pencapaiannya tujuan yang dimaksud, tetapi juga pada posisi, gambaran, orientasi, dan dukungannya. Kebijakan yang mempunyai tujuan baik. Tujuan yang baik itu sekurang-kurangnya memenuhi empat kriteria, yaitu diinginkan untuk dicapai, rasional atau realistis (*rational or realistic*), jelas (*clear*), dan berorientasi ke depan (*future oriented*).

2. Unsur masalah

Masalah merupakan unsur yang sangat penting dalam kebijakan. Kesalahan dalam menentukan masalah yang tepat, dapat menimbulkan kegagalan total dalam seluruh proses kebijakan. Tidak ada artinya suatu cara atau metode yang baik untuk pemecahan suatu masalah kebijakan jika pemecahannya dilakukan terhadap masalah yang tidak benar.

3. Unsur tuntutan (*demand*)

Sudah diketahui bahwa partisipasi merupakan indikasi dari masyarakat maju. Partisipasi ini dapat berbentuk dukungan, tuntutan, dan tantangan atau kritik. Seperti halnya partisipasi pada umumnya, tuntutan dapat bersifat

moderat atau radikal, bergantung pada urgensi dari tuntutan, gerahnya masyarakat, dan sikap pemerintah dalam menanggapi tuntutan tersebut.

4. Unsur dampak atau *outcome*

Dampak ini merupakan tujuan lanjutan yang muncul sebagai pengaruh dari pencapaian suatu tujuan. Secara visual dapat ditunjukkan jika seseorang melempar sebuah batu kedalam kolam yang airnya tenang. Pengaruh dari jatuhnya batu akan menimbulkan riak didalam air yang semakin meluas di sekitar tempat jatuhnya batu.

5. Unsur media atau alat kebijaksanaan (*policy instruments*)

Suatu kebijakan diimplementasikan dengan menggunakan sarana yang dimaksud. Beberapa dari sarana ini dapat disebutkan, antara lain kekuasaan, insentif, pengembangan kemampuan, simbolis, dan perubahan dari kebijakan itu sendiri.

B. Tahap-tahap Kebijakan Publik

Menurut William Dunn tahap-tahap kebijakan publik, berikut ini (Anggara, 2014 : 120-121):

1. Penyusunan Agenda

Agenda setting adalah sebuah fase dan proses yang sangat strategis dalam realistik kebijakan publik. Dalam proses inilah ada ruang untuk memaknai masalah publik dan prioritas dalam agenda publik yang dipertarungkan. Jika sebuah isu berhasil mendapatkan status sebagai masalah publik dan mendapatkan prioritas dalam agenda publik, isu tersebut berhak mendapatkan alokasi sumber daya publik yang lebih daripada isu lain.

Dalam *agenda setting* juga sangat penting untuk menentukan suatu isu publik yang akan diangkat dalam agenda pemerintah. Penyusunan agenda kebijakan seyogianya dilakukan berdasarkan tingkat urgensi dan esensi kebijakan, juga keterlibatan *stakeholder*.

2. Formulasi Kebijakan

Masalah yang sudah masuk dalam agenda kebijakan, kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah-masalah tersebut didefinisikan untuk dicari pemecahan masalah yang terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif atau pilihan kebijakan yang ada. Sama halnya dengan perjuangan suatu masalah untuk masuk dalam agenda kebijakan. Dalam tahap perumusan kebijakan, tiap-tiap alternatif bersaing untuk dapat dipilih sebagai kebijakan yang diambil untuk memecahkan masalah.

3. Adopsi/Legitimasi Kebijakan

Legitimasi bertujuan memberikan otorisasi pada proses dasar pemerintahan. Jika tindakan legitimasi dalam suatu masyarakat diatur oleh kedaulatan rakyat, warga negara akan mengikuti arahan pemerintah. Akan tetapi, warga Negara harus percaya bahwa tindakan pemerintah adalah sah. Legitimasi dapat dikelola melalui manipulasi simbol-simbol tertentu. Dengan proses ini orang belajar untuk mendukung pemerintah.

4. Penilaian/Evaluasi Kebijakan

Budi Winarno dalam (Anggara, 2014 : 121) evaluasi kebijakan dapat dikatakan sebagai kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian

kebijakan yang mencakup substansi, implementasi, dan dampak. Dalam hal ini, evaluasi dipandang sebagai suatu kegiatan fungsional. Artinya, evaluasi kebijakan tidak hanya dilakukan dalam seluruh proses kebijakan. Dengan demikian, evaluasi kebijakan dapat meliputi tahap perumusan masalah kebijakan, program yang diusulkan untuk menyelesaikan masalah kebijakan, implementasi, dan tahap dampak kebijakan.

2.1.2 Implementasi Kebijakan

(Abidin, 2012 : 146) Tanpa implementasi, suatu kebijakan hanyalah merupakan sebuah dokumen yang tidak bermakna dalam kehidupan masyarakat. Langkah implementasi dalam rangkaian dapat disamakan dengan fungsi aksi (*actuating*) dalam rangkaian fungsi manajemen. Jika dalam rangkaian fungsi manajemen aksi merupakan “aksi tengah” yang terkait erat dengan berbagai fungsi awal, seperti perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), dan pembenahan personel (*staffing*), serta terkait dengan fungsi akhir, pengawasan (*controlling*).

Menurut Peter Knoepfel, dkk. dalam (Islamy, 2014 : 7.2) Implementasi kebijakan adalah serangkaian proses setelah fase pemrograman yang ditujukan pada realisasi tujuan-tujuan suatu kebijakan publik.

Menurut Master dan Horn dalam (Suaib, 2016 : 82) mendefinisikan implementasi kebijakan adalah tindakan-tindakan yang dilaksanakan oleh individu-individu (dan kelompok-kelompok) pemerintah dan swasta yang diarahkan pada pencapaian tujuan sasaran yang telah ditetapkan. Tindakan -

tindakan ini, pada suatu saat berusaha untuk mentransformasikan keputusan-keputusan menjadi pola - pola operasional, serta melanjutkan usaha-usaha tersebut untuk mencapai perubahan, baik yang besar maupun yang kecil, yang diamanatkan oleh keputusan-keputusan kebijakan.

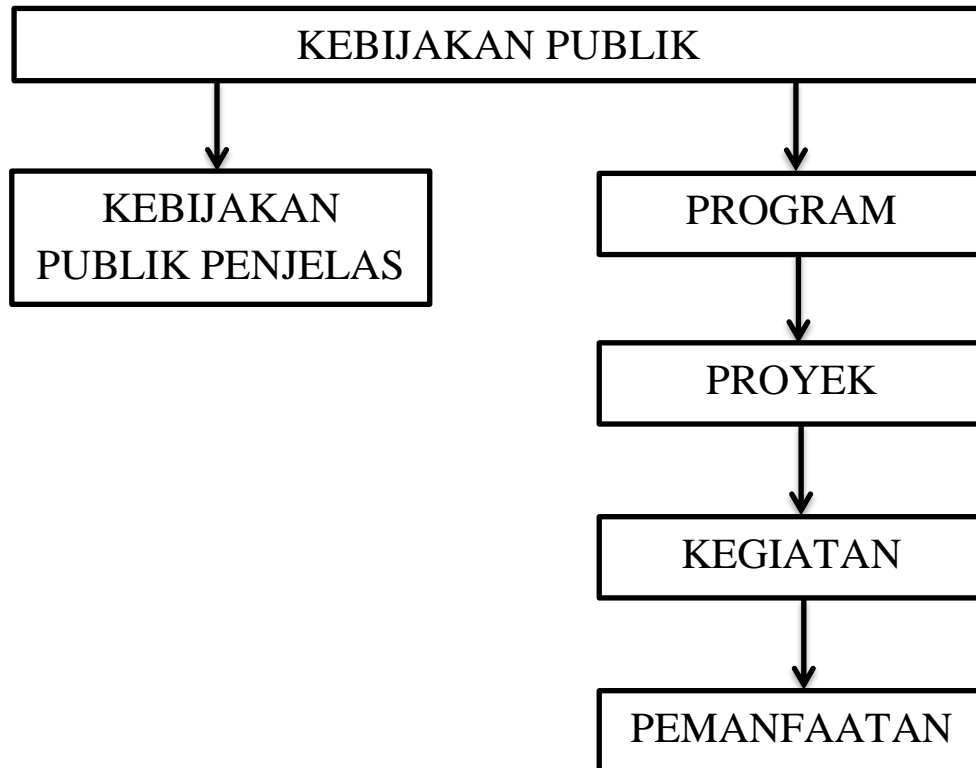
Menurut J. pressman dan A. Wildavsky dalam (Islamy, 2014 : 7.2), "*Policy implementation is a process of interaction between the settings of goals and actions geared to achieve them*". Ada empat persyaratan bagi implementasi kebijakan yang efektif, yaitu:

1. Tujuan harus jelas dan mudah dipahami;
2. Semua sumber yang diperlukan cukup tersedia;
3. Rantai komando harus dapat menyatupadukan dan mengendalikan sumber-sumber yang ada; dan
4. Sistem implementasi dilaksanakan lewat komunikasi yang efektif dan dapat mengendalikan individu-individu dan organisasi yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan.

Grindle menyatakan bahwa tugas implementasi secara umum, membuat suatu kaitan yang memudahkan tujuan-tujuan kebijakan dapat direalisasikan sebagai dampak dari suatu kegiatan pemerintah (Suntoro & Hariri, 2015 : 79).

Menurut Rian Nugroho dalam (Mulyadi, 2016 : 51) pada prinsipnya adalah sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Tidak lebih tidak kurang. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik ada dua langkah pilihan yang ada, yaitu

langsung mengimplementasikan dalam bentuk program atau melalui formulasi kebijakan atau turunan dari kebijakan publik tersebut. Secara umum dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.1 Skema Implementasi Kebijakan
(Sumber: Mutiarin & Zaenudin, 2014 : 4)

A. Tipe Pelaksanaan Kebijakan Publik

Para ahli politik telah membuat sejumlah tipologi umum untuk mengkategorikan kebijaksanaan negara. Islamy mengkategorikan kebijaksanaan Negara (Suntoro & Hariri, 2015 : 77-78), sebagai berikut:

1. *Substantive atau procedural policies*. Kebijaksanaan Negara tentang apa yang akan dilakukan oleh pemerintah, kebijaksanaan ini menekankan pada subject mattersnya.

2. *Distibutive policies*. Kebijakan-kebijaksanaan tentang pemberian pelayanan-pelayanan atau keuntungan-keuntungan bagi jumlah penduduk: individu, kelompok, perusahaan, masyarakat tertentu.
3. *Redistributive policies*. Kebijakan-kebijaksanaan yang sengaja dilakukan pemerintah untuk memindahkan pengalokasian kekayaan, pendapatan, pemilikan atau hak-hak diantara kelas-kelas dan kelompok-kelompok penduduk.
4. *Regulatory policies*. Kebijakan-kebijaksanaan tentang pengenaan pembatasan atau larangan-larangan perbuatan atau tindakan-tindakan bagi seseorang atau sekelompok orang.
5. *Self-regulatory policies*. Kebijakan-kebijaksanaan tentang pembatasan-pembatasan atau pengawasan perbuatan pada masalah-masalah tertentu bagi sekelompok orang. Kebijakan ini sering dibutuhkan dan didukung oleh kelompok orang-orang yang berkepentingan dengan kebijakan itu sebagai alat untuk melindungi atau meningkatkan kepentingan mereka.
6. *Material dan symbolic policies*. Kebijakan-kebijaksanaan tentang pengalokasian atau penyediaan sumber-sumber material yang nyata atau kekuasaan yang hakiki bagi para penerimanya atau mengenakan beban-beban bagi yang harus mengalokasikan.
7. *Collective goods dan private goods policies*. Kebijakan-kebijaksanaan tentang penyediaan barang-barang dan pelayanan-pelayanan keperluan orang banyak. *Collective goods* adalah kebijakan penyediaan barang-barang dan pelayanan-pelayanan tersedia untuk satu orang maka harus

disediakan bagi semua orang, contoh:kebijaksanaan penyediaan kebutuhan bahan pokok. *Private goods* adalah kebijaksanaan-kebijaksanaan tentang penyediaan barang atau pelayanan-pelayanan hanya bagi kepentingan perorangan yang tersedia dipasaran bebas dan orang yang memerlukan harus membayar biaya tertentu,contoh:tempat hiburan,jalan tol,rumah sakit dan sebagainya.

8. *Liberal dan conservative policies*. Kebijakan yang menganjurkan pemerintah untuk mengadakan perubahan-perubahan sosial terutama yang diarahkan untuk memperbesar hak-hak persamaan. Kebijakan liberal menghendaki agar pemerintah mengadakan koreksi terhadap ketidakadilan dan kelemahan-kelemahan yang ada pada aturan-aturan sosial, meningkatkan program-program ekonomi dan kesejahteraan. *Conservative policies* adalah lawan dari *liberal policies*, paham ini aturan sosial yang ada cukup baik dan tidak perlu adanya perubahan sosial.

B. Faktor-faktor yang Berpengaruh Terhadap Pelaksanaan Kebijakan

Edward III dalam (Suntoro & Hariri, 2015 : 80) mengemukakan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap implementasi kebijakan, adalah sebagai berikut:

1. Komunikasi. Keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan yaitu tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran sehingga akan mengurangi distorsi implementasi.
2. Sumber daya. Sumber daya tersebut dapat berwujud sumber daya manusia dan sumber daya finansial.

3. Disposisi. Watak dan karakter yang dimiliki implementor seperti; komitmen, kejujuran, sifat demokrasi.
4. Struktur birokrasi. Salah satu struktur organisasi yang penting adalah SOP (*Standard Operating Procedure*) menjadi pedoman bagi setiap implementor dalam bertindak.

2.1.3 Evaluasi Kebijakan

Bila kebijakan dipandang sebagai suatu pola kegiatan yang berurutan, maka penilaian atau evaluasi kebijakan merupakan tahap akhir dalam proses kebijakan. Penilaian dilakukan karena tidak semua program kebijakan publik mencapai hasil yang diinginkan. Penilaian kebijakan ditujukan untuk melihat sebab-sebab kegagalan suatu kebijakan atau untuk mengetahui apakah kebijaksanaan publik yang telah dijalankan meraih dampak yang diinginkan. Secara umum, penilaian kebijakan dapat dikatakan sebagai kegiatan yang mencakup estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup: isi kebijakan, pelaksanaan kebijakan, dan dampak kebijakan (Suntoro & Hariri, 2015 : 83).

Menurut pakar Moekijat dalam (Suaib, 2016 : 107) yaitu evaluasi adalah usaha-usaha untuk menyelidiki apakah program yang dilaksanakan sesuai dengan apa yang diinginkan atau tidak, dan menurut Bryant dan White dalam (Suaib, 2016 : 107) mendefinisikan “evaluasi sebagai upaya untuk mendokumentasikan apa yang terjadi dan juga mengapa hal itu terjadi”. Idealnya suatu proyek dirancang untuk menentukan hubungan sebab-akibat itu, dan dengan demikian

pemikiran ke depan mengenai evaluasi merupakan upaya mengetahui apakah kaitan itu sungguh-sungguh ada.

Menurut William N. Dunn dalam (Islamy, 2014 : 8.2) mengatakan bahwa “Evaluasi adalah sebuah prosedur analisis kebijakan yang digunakan untuk menghasilkan informasi tentang kinerja kebijakan untuk memenuhi kebutuhan, nilai, dan peluang bagi pemecahan masalah”. Definisi ini lebih berfokus pada proses penilaian kinerja kebijakan dalam memecahkan masalah.

William N. Dunn dalam (Islamy, 2014 : 8.5) juga menjelaskan adanya tiga fungsi utama evaluasi kebijakan, yaitu: (1) Menyediakan informasi yang sah dan dapat dipercaya tentang kinerja kebijakan, yakni sejauh mana kebutuhan, nilai dan peluang telah terealisasi lewat aksi publik, (2) Evaluasi memberikan kontribusi terhadap klarifikasi dan kritik kepada nilai yang menjadi dasar penetapan tujuan dan sasaran kebijakan, dan (3) Evaluasi memberikan kontribusi terhadap penerapan metode analisis kebijakan, misalnya dalam menstruktur masalah dan rekomendasi alternatif yang diusulkan.

A. Tahapan Penilaian Kebijakan Publik

(Suntoro & Hariri, 2015 : 83-84) dalam hal ini penilaian kebijakan dipandang sebagai suatu kegiatan fungsional artinya penilaian kebijakan tidak hanya dilakukan pada tahap akhir saja, melainkan dilakukan pada fase identifikasi masalah kebijakan, penyusunan agenda, perumusan kebijakan, pengesahan kebijakan, implementasi kebijakan. Langkah-langkah penilaian kebijakan menurut Edward A Suchman ada enam langkah:

1. Mendefinisikan tujuan program yang akan dievaluasi;
2. Analisis terhadap masalah;
3. Deskripsi dan standarisasi kegiatan;
4. Pengukuran terhadap tingkatan perubahan yang terjadi;
5. Menentukan apakah perubahan yang diamati merupakan akibat dari kegiatan tersebut atau karena penyebab yang lain; dan
6. Beberapa indikator untuk menentukan keberadaan suatu dampak.

Menurut Widodo dalam (Suntoro & Hariri, 2015 : 84) untuk melakukan penilaian kebijakan setidaknya-tidaknya tahapan yang harus dilakukan, yaitu:

1. Mendefinisikan apa yang menjadi tujuan kebijakan, program dan kegiatan;
2. Penjabaran tujuan kebijakan, program dan kegiatan kedalam kriteria atau indikator pencapaian tujuan;
3. Pengukuran indikator pencapaian tujuan kebijakan, program;
4. Berdasarkan indikator pencapaian tujuan kebijakan dicari data yang dilapangan; dan
5. Hasil data yang diperoleh dari lapangan kemudian dilakukan pengolahan dan dikomparasi dengan kriteria pencapaian tujuan.

B. Kriteria Evaluasi Kebijakan Publik

Menurut Dunn dalam (Mulyadi, 2016 : 124) terdapat enam kriteria yang dapat digunakan untuk menilai sebuah kinerja berhasil atau tidak berhasil, yaitu:

1. *Effectiveness* atau keefektifan, yaitu berkenaan dengan apakah suatu alternative mencapai hasil (akibat) yang diharapkan, atau mencapai tujuan dari diadakannya tindakan.

2. *Efficiency* atau efisiensi, yaitu berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektivitas tertentu.
3. *Adequacy* atau kecukupan, yaitu berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektivitas memuaskan kebutuhan, nilai, atau kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah.
4. *Equity* atau kesamaan, yaitu erat hubungan dengan rasionalitas legal dan sosial dan menunjuk pada distribusi akibat dan usaha antara kelompok-kelompok yang berbeda dalam masyarakat.
5. *Responsiveness* atau ketanggapan, yaitu berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai masyarakat.
6. *Appropriateness* atau ketepatangunaan, yaitu yang berhubungan dengan rasionalitas substantif, karena pertanyaan tentang hal ini tidak berkenaan dengan satuan kriteria individu tetapi dua atau lebih kriteria secara bersama-sama.

2.1.4 Ekspor dan Impor

Perdagangan internasional merupakan suatu kejadian dari eksistensi pelaku bisnis, individu dan pemerintah yang ingin melakukan transaksi jual beli barang atau jasa yang diproduksi di negara lain (Purwito & Indriani, 2015 : 1).

Ekspor dan impor merupakan bagian dari perdagangan internasional, yang pada prinsipnya, terdapat barang, jasa atau modal dan pihak-pihak yang akan melakukan perjanjian jual beli. Apabila transaksi ini sudah melewati batas-batas negara, akan terjadi disatu pihak disebut sebagai eksportir yaitu yang menjual

barang dan jasa. Sedangkan di pihak lain subjek yang membeli, dapat dikatakan sebagai importir (Purwito & Indriani, 2015 : 7).

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan, pasal 12 ayat (1) yang menyatakan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau Pelaku Usaha secara sendiri-sendiri atau bersama-sama mengembangkan sarana Perdagangan berupa:

1. Pasar rakyat;
2. Pusat perbelanjaan;
3. Toko swalayan;
4. Gudang;
5. Perkulakan;
6. Pasar lelang komoditas;
7. Pasar berjangka komoditi; atau
8. Sarana Perdagangan lainnya.

A. Ekspor

Ekspor diartikan sebagai kegiatan penjualan atau pengiriman barang jasa atau modal yang berasal dari daerah pabean ke luar daerah pabean melalui perjanjian atau tidak yang dilakukan oleh orang badan hukum atau negara sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pengertian daerah pabean adalah seluruh wilayah perairan daratan maupun sungai dan zona eksklusif dari suatu negara baik yang ditetapkan dan diakui secara internasional maupun didasarkan atas kedaulatan dan undang-undang serta batas-batas suatu negara Sesuai dengan praktik ekspor dapat dibagi menjadi (Purwito & Indriani, 2015 : 7), yaitu:

1. Ekspor Langsung

Ekspor langsung merupakan kegiatan yang terdapat dua pihak, yaitu di satu sisi adalah konsumen atau pembeli yang berkeinginan untuk membeli barang langsung dari tempat asal barang, sedangkan sisi lain adalah sebagai penjual. Pelaksanaan ekspor langsung, biasanya dilakukan dengan cara mengirimkan barang beserta dokumen pelindungnya ke pembeli. Persyaratan yang perlu diperhatikan dalam melakukan ekspor langsung, antara lain: (1) Mengenal dengan baik atau mencari informasi secara rinci dan lengkap mengenai reputasi dari importir yang akan menjadi mitra dagang, didapatkan dari mitra dagang yang lain, kamar dagang, perwakilan negara pengekspor atau informasi dari sumber lainnya. Demikian juga sebaliknya, importir harus benar mengetahui dan memahami siapa eksportir, jejaring kerja, produksi dan mutu barang yang akan dijual. (2) Mempelajari dan meneliti semua aspek dari transaksi, termasuk semua peraturan dari negara pengimpor yang terkait dengan larangan, pembatasan dan tata niaga serta tanggapan importir atas produk dan kinerja eksportir, sebagai umpan balik. (3) Selalu hadir dan memantau/mengikuti semua proses dari transaksi ekspor yang dilakukan, agar tahap demi tahap dapat dilakukan perbaikan, terutama apabila terdapat masalah yang harus diselesaikan.

2. Ekspor Tidak Langsung

Ekspor tidak langsung dilakukan melalui pihak ketiga, yang disebabkan beberapa hal yang melatarbelakangi, seperti lokasi pasar, ketersediaan sarana dan prasarana (telekomunikasi, perbankan, transportasi) serta

networking. Barang-barang yang diekspor dapat merupakan barang setengah jadi dan selanjutnya diolah atau barang jadi yang memerlukan pengemasan dan *labeling* lebih lanjut sebelum dikirimkan ke negara pembeli.

3. Re-ekspor

Re-ekspor adalah kegiatan yang dilakukan oleh importir untuk mengekspor barang-barang yang telah dipesan/dibeli dan sampai di pelabuhan tujuan. Hal-hal yang dilakukan dalam kegiatan re-ekspor adalah, bahwa barang yang telah tiba/dikirim tidak sesuai dengan pesanan atau adanya cacat yang mengganggu kepemilikan atau penggunaan barang, adanya peraturan baru yang melarang atau membatasi importasi barang tersebut.

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, pasal 38 ayat (3) Kebijakan Perdagangan Luar Negeri paling sedikit meliputi: (1) Peningkatan jumlah dan jenis serta nilai tambah produk ekspor; (2) Pengharmonisasian standar dan prosedur kegiatan perdagangan dengan negara mitra dagang; (3) Penguatan kelembagaan di sektor Perdagangan Luar Negeri; (4) Pengembangan sarana dan prasarana penunjang Perdagangan Luar Negeri; dan (5) Perlindungan dan pengamanan kepentingan nasional dari dampak negatif Perdagangan Luar Negeri.

Dalam arus keluar dan masuknya suatu barang terdapat pengendalian Perdagangan Luar Negeri menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, pasal 38 ayat (4) yang meliputi:

1. Perizinan;

2. Standar; dan
3. Pelarangan dan pembatasan.

B. Impor

Impor merupakan kegiatan memasukkan barang ke dalam Daerah Pabean baik yang dilakukan oleh orang pribadi maupun badan hukum yang dibawa oleh sarana pengangkut telah melintasi batas negara dan kepadanya diwajibkan memenuhi kewajiban Pabean seperti, pembayaran bea masuk dan pajak dalam rangka impor yang terutang. Untuk memudahkan prosedur yang harus ditempuh, pengawasan garis batas negara ditarik ke pelabuhan-pelabuhan yang ditunjuk Menteri Keuangan sebagai pelabuhan laut atau pelabuhan internasional. Terutama untuk barang-barang impor yang diangkut terus, diangkut lanjut, transit oleh sarana pengangkut ataupun dibongkar (Purwito & Indriani, 2015 : 10).

Komoditi diartikan sebagai barang yang diperdagangkan dan dapat dilakukan tukar-menukar dalam bentuk ekspor dan impor. Berikut beberapa komoditi dalam impor, (Purwito & Indriani, 2015 : 11), yaitu:

1. Bahan Baku. Indonesia mengimpor berbagai jenis bahan baku untuk kebutuhan industri, bahan baku industri bisa berupa bahan baku pokok dan bahan pendamping. Misalnya, kebutuhan akan komponen kendaraan bermotor, selain *local content* dari produk dalam negeri dan sebagian masih diimpor.
2. Barang-Barang Konsumsi, terbanyak importasi yang dilakukan oleh importir saat ini adalah barang konsumsi, yaitu barang yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga sehari-hari antara lain alat

elektronik, susu, daging, beras, mentega, makanan kalengan, kosmetik, kedelai, obat-obatan, termasuk untuk kecantikan dan *fashion*.

3. Barang permainan anak-anak, membanjirnya barang-barang murah untuk mainan anak-anak, mengakibatkan keamanan dan kesehatan terhadap pemakainya banyak diabaikan.
4. Minyak bumi dan mineral, ekspor komoditi ini sudah dibatasi, misalnya dengan kewajiban membangun kilang atau *smelter*, yang diharapkan dapat memberikan nilai tambah.

Kegiatan importasi, harus diikuti oleh pemenuhan kewajiban kepabeanan, seperti penyampaian pemberitahuan Pabean, pembayaran bea masuk dan pajak dalam rangka impor dan kelengkapan dokumen-dokumen yang diperlukan dalam penelitian dokumen dan pemeriksaan fisik atas barang. Kegiatan impor tidak terlepas dari ketentuan-ketentuan dalam perdagangan, Angka Pengenal Importir (API) yaitu, tanda pengenal sebagai importir yang harus dimiliki setiap perusahaan yang melakukan perdagangan impor. Orang yang melakukan impor disebut importir, dalam Peraturan Perundang-undangan, orang disini maksudnya subjek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban dari hasil perbuatannya dalam mengimpor dan pemenuhan semua kewajibannya yang dibagi atas (Purwito & Indriani, 2015 : 11), sebagai berikut:

1. Importir sebagai orang atau badan hukum dapat melakukan kegiatan importasi baik sebagai perorangan ataupun sebagai suatu badan hukum. Importir umum atau perorangan, melakukan kegiatan importasi dengan tujuan untuk dimiliki, dialihkan kepada orang lain atau diperjual belikan.

Importir umum mendapatkan izin dari Menteri Perdagangan berupa Angka Pengenal Impor (API).

2. Importir terbatas, orang atau badan hukum yang telah memiliki Angka Pengenal Impor (API) untuk perdagangan umum, untuk melakukan importasi barang-barang tertentu, seperti beras, gula dan komoditi lain yang diatur tata niaganya.
3. Importir produsen, merupakan produsen atas barang yang membutuhkan bahan baku untuk dalam proses produksi barang yang dihasilkan. Atas subjek ini harus memiliki izin dari pemerintah untuk mengimpor barang yang dibutuhkan.

2.2 Penelitian yang Terdahulu

Adapun penelitian terdahulu pada penelitian ini adalah:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Suherry yang berjudul Implementasi Kebijakan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2007 Tentang Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Bintan, September 2016, Jurnal Ilmu Pemerintahan, Volume 1 Nomor 2, Hal. 229-246. p-ISSN: 2503-4685, e-ISSN: 2528-0724. Penelitian ini merupakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian bahwa pelaksanaannya menunjukkan kondisi yang yang tidak baik seperti yang diharapkan. Terutama jika dilihat dari sumber daya, baik itu dari ketersediaan pegawai/staf yang memadai, pegawai/staf yang berkompeten dibidangnya maupun fasilitas fisik atau sarana prasarana kerja yang tidak memadai karena dari segi bangunan dari Badan Pengusahaan (Suherry, 2016).

2. Penelitian yang dilakukan oleh Pradito Sony W yang berjudul Implementasi Kebijakan Free Trade Zone Di Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau (Studi Kasus : Peredaran Rokok Khusus Free Trade Zone), Oktober 2018, Jurnal Ilmiah, Volume 8 Nomor 1, Hal. 11-26. p-ISSN: 2614-0241, e-ISSN: 2301-6965. Penelitian ini merupakan metode kualitatif. Hasil penelitian Implementasi Kebijakan Free Trade Zone Di Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau belum sepenuhnya baik hal ini disebabkan masih mengalami beberapa kendala dilihat dari beberapa aspek. 1. Sumber daya dalam implementasi kebijakan Free Trade Zone dalam Peredaran Rokok Khusus Free Trade Zone masih kurang cukup, baik sumber daya keuangan maupun sumber daya manusia. 2. Hubungan antar organisasi pelaksana kebijakan Free Trade Zone dalam Peredaran Rokok Khusus Free Trade Zone masih lemah. 3. Karakteristik organisasi pelaksana cukup mendukung untuk implementasi kebijakan Free Trade Zone dalam Peredaran Rokok Khusus Free Trade Zone. Badan Pengusahaan Kawasan Bintan dan Badan Penanaman Modal dan Promosi Daerah Kabupaten digabungkan karena memiliki tugas yang sama dan agar tidak overlapping dalam pelaksanaan kewenangan. 4. Kondisi sosial dan kondisi politik dan kondisi ekonomi belum sepenuhnya mendukung implementasi kebijakan Free Trade Zone dalam Peredaran Rokok Khusus Free Trade Zone. 5. Implementor belum memahami seluruh kebijakan implementasi kebijakan Free Trade Zone dalam Peredaran Rokok Khusus Free Trade Zone (Sony, 2018).

3. Penelitian yang dilakukan oleh David Sandro Simorangkir dan Amrie Firmansyah yang berjudul *Evaluasi Implementasi Peranan Pengendalian Internal: Pelaksanaan Impor Sementara di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya X*, Juni 2017, *Jurnal Akuntan*, Volume 2 Nomor 1, Hal. 81-98, E-ISSN: 2528-0163. Penelitian ini merupakan metode kualitatif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea Cukai (KPPBC) Tipe Madya X telah memiliki pengurusan perizinan impor sementara yang baik, namun terdapat prosedur yang belum dilaksanakan sesuai dengan aturan. Hal lainnya adalah walaupun prosedur pelaksanaan impor sementara telah berjalan dengan baik, namun terdapat sedikit kekurangan dalam penatausahaan/ administrasi dokumen antara lain pada saat penomoran dan pengarsipan dokumen. Hal yang ketiga adalah aktivitas pengendalian internal belum sepenuhnya dilaksanakan dengan baik karena belum terdapat jaminan bahwa pengawasan dan pengendalian fisik dalam pelaksanaannya sesuai dengan izin yang telah diberikan (Simorangkir & Firmansyah, 2017).
4. Penelitian yang dilakukan oleh Siti Nurlaela yang berjudul *Strategi Pengembangan Usaha Melalui Penguatan Manajemen, Pemasaran, Dan Keuangan Industri Kreatif Kerajinan Mebel Ekspor Di Kabupaten Klaten*, 2015, *Jurnal Nasional*, Hal. 695-704, ISSN: 2337-4349. Penelitian ini merupakan metode kualitatif. Hasil penelitian ini bahwa fungsi manajemen dalam perusahaan belum terlaksana dengan baik. Pengelolaan Keuangan masih sangat sederhana, perlu sistim informasi akuntansi komputerisasi,

sehingga memudahkan dalam penyajian laporan keuangan secara profesional bidang ekspor dan perpajakan, Keahlian yang lebih penting adalah keahlian logistik dan manajemen umum pemasaran dan pembuatan website. Perusahaan yang telah melakukan ekspor dalam jangka waktu yang lama dapat terus bertahan dalam pasar ekspor (Nurlaela, 2015).

5. Penelitian yang dilakukan oleh Ibrahim Rachman yang berjudul Analisis Kinerja Ekspor Komoditi Perkebunan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Sulawesi Utara, September 2013, Jurnal EMBA, Volume 1 Nomor 3, Hal. 401-410, ISSN: 2303-1174. Penelitian ini merupakan deskriptif. Hasil penelitian ini bertujuan untuk melihat kinerja Provinsi Sulawesi Utara dalam pelaksanaan ekspor, dengan menggunakan indikator nilai ekspor, pangsa nilai ekspor dan PDRB Sulawesi Utara. Penelitian ini dilaksanakan di Dinas Perindustrian Perdagangan, Badan Pusat Statistik dan Bank Indonesia Sulawesi Utara dengan menggunakan metode wawancara dan studi pustaka. Penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja ekspor mengalami perbaikan atau peningkatan, hal ini terlihat dari peningkatan volume dan nilai ekspor komoditi perkebunan dikuasai oleh ekspor serta nilai pangsa pasar berfluktuasi dengan kecenderungan mengalami peningkatan. Berdasarkan hasil perhitungan maka nilai ekspor berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi (Rachman, 2013).
6. Penelitian yang dilakukan oleh Mirza Hassan Hoesseini dan Saeideh Syadat yang berjudul *Evaluation of Export Development Strategies In Leather Industry*, yang dimuat pada Jurnal Medwell, Volume 11 Nomor 12, 2017,

Hal. 1998-2002, ISSN: 1993-5250. Penelitian ini merupakan deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelanggan mengharapkan tingkat keseimbangan tertinggi dan keseimbangan tingkat terbaik terkait dengan perspektif proses internal. Baik dalam hal pertumbuhan dalam bidang keuangan dan tingkat keseimbangan pembelajaran berada pada tingkat terendah. Hasilnya bahwa kinerja pelanggan dengan keuangan seimbang dan proses internal dengan pertumbuhan keduanya tidak seimbang (Hosseini & Syadat, 2017).

2.3 Kerangka Pemikiran



Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran
(Sumber: Hasil Penelitian 2019)

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian deskriptif kualitatif ialah salah satu metode yang digunakan untuk memperoleh kebenaran serta tergolong sebagai penelitian ilmiah yang dibangun atas dasar teori-teori yang berkembang dari penelitian serta terkendali atas dasar empirik.

Pengertian teknik penelitian kualitatif menurut (Sugiyono, 2012 : 9) teknik penelitian yang berlandaskan pada postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada situasi yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data yang dapat dilakukan secara triangulasi, analisis data bersifat induktif/kualitatif, serta hasil penelitian kualitatif lebih menekankan pada generalisasi. Tujuan penulis menggunakan metode tersebut adalah untuk mendeskripsikan dan memperoleh pemahaman menyeluruh dan mendalam tentang evaluasi kebijakan ekspor dan impor di Kota Batam oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batam.

3.2 Fokus Penelitian

Fokus penelitian menurut Spradley dalam (Sugiyono, 2012 : 209) merupakan domain tunggal atau beberapa domain yang terkait dari situasi sosial. Dalam penelitian kualitatif, penentuan fokus dalam skripsi lebih didasari pada

tingkat kebaruan informasi yang akan diperoleh dari situasi sosial (lapangan). Untuk memudahkan penulis dalam menganalisis masalah ini, oleh sebab itu penelitian ini difokuskan pada evaluasi kebijakan ekspor dan impor oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batam.

3.3 Sumber Data

Populasi tidak dimanfaatkan dalam penelitian kualitatif, namun Spradley dalam (Sugiyono, 2012 : 215) menamakan situasi sosial yang terdiri dari tiga elemen yaitu: sebuah tempat (*place*), pelaku (*actor*), dan aktivitas (*activity*) yang berintegrasi secara sinergis. Ada dua sumber data yg dimanfaatkan peneliti, yaitu:

1. Data Primer

Data primer ialah data yang diperoleh peneliti secara langsung dari pihak yang menjadi narasumber penelitian. Narasumber dipilih dalam penelitian ini dengan teknik *purposive sampling*, dimana pemilihan narasumber dilakukan dengan sengaja berdasarkan kriteria yang telah ditentukan dan informan yang menjadi narasumber merupakan informan yang jelas dalam memberikan informasi secara mendalam kepada peneliti. Berdasarkan teknik pemilihan informan tersebut maka ditetapkan kriteria-kriteria informan penelitian ini:

- a. Informan benar-benar mengetahui permasalahan, serta terlibat langsung dengan kegiatan yang menjadi sasaran penelitian ini dan biasanya ditandai oleh kemampuan penyampaian informasi secara spontan atau diluar kepala ketika menjawab suatu pertanyaan.

- b. Informan masih berperan aktif dalam lingkungan kegiatan yang menjadi sasaran penelitian.
- c. Informan mempunyai integritas dan cukup banyak waktu dan kesempatan untuk dimintai informasi.
- d. Informan dalam memberikan informasi tidak cenderung mengolah informasi terlebih dahulu serta relatif masih lugu ketika menyampaikan informasi.

Berdasarkan kriteria-kriteria tersebut diatas maka ditetapkanlah informan penelitian ini, yakni:

Tabel 3.1 Daftar Informan

No	Nama	Jabatan
1.	Leny Nuriskawaty	Kepala Seksi Ekspor dan Impor Kota Batam
2.	Tari	Pelaku Usaha Pasar Seken Aviari Batu Aji
3.	Syahril	Pelaku Usaha Pasar Seken Aviari Batu Aji
4.	Fitri Wulandari	UD. Sumber Sarana
5.	Santi	UD. Maju Jaya Sentosa
6.	Irene	Toko Tarigan
7.	Retnowati	Toko Batam Harta Mandiri
8.	Ita	Konsumen
9.	Reza Fahlevi	Konsumen
10.	Jacky	Konsumen
11.	Dewi Sartika	Konsumen
12.	Sarah	Konsumen

(Sumber: Hasil Observasi Peneliti 2019)

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data dari berbagai teori dan informasi yang diperoleh secara tidak langsung, baik dari referensi buku dan website, serta

berbagai dokumen yang tertuang dalam website khusus Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batam dalam meningkatkan nilai ekspor dan impor di Kota Batam, dan juga data lainnya yang relevan dengan kebutuhan dan tujuan penelitian.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

(Sugiyono, 2012 : 137) Wawancara dimanfaatkan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti. Peneliti melakukan wawancara dengan pegawai Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batam, pelaku usaha dan masyarakat Batam.

2. Observasi

Peneliti melakukan observasi dengan secara langsung datang ke Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batam.

3. Dokumentasi

Ialah catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen biasanya berbentuk lisan, gambar atau karya – karya monumental dari seorang selaku bahan tambahan buat peneliti. Penelitian ini memanfaatkan buku-buku yang mendukung dalam penelitian.

3.5 Metode Analisis Data

Miles and Huberman dalam (Sugiyono, 2012 : 246) mengemukakan bahwa aktifitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktifitas dalam analisis data ialah:

1. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan potonya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambar yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.

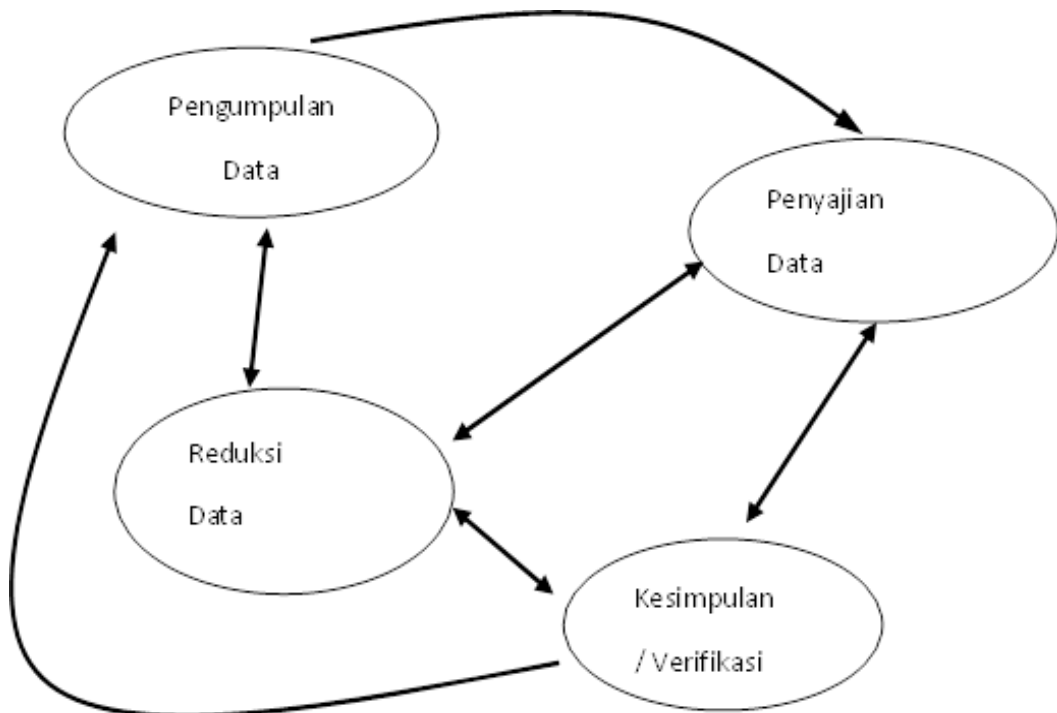
2. *Data Display* (Penyajian Data)

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan flowchat. Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif teks yang bersifat naratif.

3. *Conclusion Drawing/Verification* (Penarikan Kesimpulan/Verifikasi)

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap yang kemudian setelah diteliti menjadi jelas.

Ketiga alur diatas dapat dilihat dengan bagan alur pemikiran sebagai berikut:



Gambar 3.1 Komponen dalam Analisis Data (*Interactive Model*)
(Sumber: Sugiyono, 2012 : 247)

3.6 Keabsahan Data

Peneliti memakai uji keabsahan data (Sugiyono, 2014 : 270), yakni:

1. *Uji Kredibilitas*, kepercayaan terhadap data hasil penelitian dilakukan dengan perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, triangulasi, diskusi dengan teman sejawat, analisis kasus negative dan membercheck.
2. *Uji Transferability*, untuk dapat memhamai hasil penelitian harus memberikan uraian yang rinci, jelas, sistematis dan dapat dipercaya. Dengan demikian maka pembaca menjadi lebih jelas atas hasil penelitian tersebut,

sehingga dapat memutuskan dapat atau tidaknya untuk mengaplikasikan hasil penelitian tersebut ditempat lain.

3. *Uji Depenability*, melakukan audit terhadap seluruh prsoes enelitian caranya dilakukan oleh auditor yang independen, atau pembimbing untuk mengaudit keseluruhan aktivitas peneliti dalam melakukan penelitian.
4. *Uji Konfirmability*, berarti menguji hasil penelitian dikaitkan dengan proses yang dilakukan. Bila hasil penelitian merupakan fungsi dari proses penelitian yang dilakukan, maka penelitian tersebut telah memenuhi standar *confirmability*.

3.7 Lokasi dan Jadwal Penelitian

A. Lokasi Penelitian

Lokasi yang dilakukan dalam penelitian bertempat di Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang berlokasi di Kantor Dinas Bersama Lantai 5 Jl. Raja Isa No.17, Belian, Kec. Batam Kota, Kota Batam, Kepulauan Riau 29444, Telepon (0778) 466742 dan Fax 0778-466703, E-mail: perindag@batam.go.id

